

# YUK, LAWAN HOAKS POLITIK, CIPTAKAN PEMILU DAMAI!



Wisnu Martha Adiputra | Novi Kurnia  
Zainuddin Muda Z. Monggilo | Ardian Indro Yuwono | Rahayu

# YUK, LAWAN HOAKS POLITIK, CIPTAKAN PEMILU DAMAI!



Wisnu Martha Adiputra | Novi Kurnia  
Zainuddin Muda Z. Monggilo | Ardian Indro Yuwono | Rahayu

# **Yuk, Lawan Hoaks Politik, Ciptakan Pemilu Damai!**

Penulis

**Wisnu Martha Adiputra**

**Novi Kurnia**

**Zainuddin Muda Z. Monggilo**

**Ardian Indro Yuwono**

**Rahayu**

Tim Riset

**Andi Pajolloi Bate**

**Rifky Farouq**

**Velina Aulia**

Ilustrator dan Layouter

**Mahendra Senoaji**

**Anung Srihadi**

Sampul

**Anung Srihadi**

**Gilang Adikara**

Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang Mengutip atau Memperbanyak Sebagian atau Seluruh Isi Buku Ini

Tanpa Izin Tertulis dari Penerbit

Cetakan 1, Februari 2019

**ISBN 978-602-71877-7-1**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM

Gedung BA, Lantai 5, FISIPOL UGM

Jalan Sosio Yustisia No.2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

## PRAKATA

# GERAKAN NASIONAL LITERASI DIGITAL SIBERKREASI

Kemajuan teknologi menciptakan disrupsi pada kehidupan sehari-hari, mulai dari otomatisasi yang mengancam ragam mata pencaharian, hingga bagaimana masyarakat mencerna dan mengabarkan informasi. Dewasa ini, lebih dari setengah populasi di Indonesia sudah terhubung Internet. Angka penetrasi Internet makin tinggi dari tahun ke tahun. Eric Schmidt, insinyur dari Google, bahkan memprediksikan bahwa tahun 2020 nanti seluruh manusia di dunia akan *online*.

Sayangnya, kemajuan inovasi digital dan kemudahan mengakses Internet masih belum diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bak air maupun api, teknologi juga bisa dilihat sebagai anugerah sekaligus ancaman. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, ia bisa jadi sangat berbahaya. Maka dari itulah, Seri Buku Literasi Digital hasil kolaborasi para pemangku kepentingan multisektoral ini kami anggap perlu kembali diluncurkan ke publik.

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi berterima kasih pada para mitra kami yang tanpa lelah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengedukasi masyarakat. Kedewasaan, kecakapan, dan keamanan dalam menggunakan media digital sangat perlu diperjuangkan. Di balik jutaan kesempatan bagi masyarakat Indonesia pada era transformasi digital, terdapat masalah serius yang sama banyaknya, mulai dari: penyebaran konten negatif, seperti perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme daring, ketergantungan pada gawai, eksploitasi seksual dan pornografi; hingga keterbatasan kompetensi dasar menuju revolusi industri 4.0. Kami percaya bahwa pendidikan adalah pilar paling penting untuk mencegah dan menanggulangi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh penyimpangan pemanfaatan teknologi.

Literasi digital telah menjadi keharusan yang mendesak dilakukan dalam skala nasional secara masif, komprehensif, dan sistematis. Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 telah secara khusus

mendorong institusi pendidikan untuk lekas beradaptasi di era revolusi industri 4.0, salah satunya dengan memantapkan kemampuan literasi digital. Sembari mengawal proses tersebut, SiBerkreasi merasa perlu menyatukan pegiat literasi digital dari berbagai disiplin ilmu dan sektor untuk menyediakan sumber ilmu yang berkualitas, mudah dijangkau, serta bebas biaya.

Sasaran literasi digital perlu diperluas, sehingga dalam Seri Buku Literasi Digital kali ini kami dengan bangga mempersembahkan terbitan dari pelbagai kontributor dari bidang keahlian yang majemuk. Tema-tema literasi digital, antara lain: tata kelola digital, pola asuh digital, ekonomi digital, gaya hidup digital, dan kecakapan digital; dapat ditemui untuk dipelajari serta disebarluaskan ke khalayak ramai. Kami harap, para orang tua, siswa, anak-anak, hingga pemerintah daerah, dapat mengambil manfaat penuh dari rangkaian terbitan ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam peluncuran Seri Buku Literasi Digital tahun 2019. Untuk para pembaca, kami sampaikan selamat menjumpai ilmu baru dan jangan segan menjadi duta literasi digital bagi sekitar.

Jakarta, 1 Februari 2019

Ketua Umum SiBerkreasi  
Dedy Permadi

PRAKATA

## JARINGAN PEGIAT LITERASI DIGITAL (JAPELIDI)

Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) adalah komunitas yang sebagian besar terdiri dari akademisi dan pegiat literasi digital yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Komunitas yang mulai beraktivitas pada tahun 2017 peduli pada beragam upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia. Beragam program literasi digital dilakukan baik secara kolaboratif atau di masing-masing perguruan tinggi untuk mengatasi beragam persoalan masyarakat digital.

Salah satu pekerjaan kolaboratif Japelidi yang dilakukan tahun 2017 adalah penelitian peta gerakan literasi digital di Indonesia. Penelitian yang dikoordinatori oleh Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memetakan 342 kegiatan literasi digital dengan melibatkan 56 peneliti dari 26 perguruan tinggi. Salah satu temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa ragam yang sering dilakukan dalam kegiatan sosialisasi digital adalah sosialisasi. Sedangkan kelompok sasaran yang paling sering menjadi target beragam gerakan literasi digital adalah kaum muda.

Untuk mendiskusikan hasil penelitian Japelidi sekaligus memetakan berbagai isu terkini terkait literasi digital di Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan Konferensi Nasional Literasi Digital pada tanggal 12 September 2017. Konferensi ini diikuti oleh 30 pemakalah dan 200 peserta. Lebih separuh dari makalah yang disampaikan dalam konferensi ini sudah dan akan diterbitkan di Jurnal Informasi UNY.

Berbeda dengan kegiatan pada tahun 2017 yang memfokuskan pada kegiatan penelitian dan konferensi, pada tahun 2018 Japelidi melakukan program penerbitan serial buku panduan literasi digital. Untuk itu, selain mengadakan serial rapat pra-*workshop* di Yogyakarta pada tanggal 21 dan 22 Maret 2018, Japelidi menyelenggarakan *workshop* penulisan pedoman buku literasi digital pada tanggal 27 dan 28 April 2018. *Workshop* yang dijamu oleh

Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) ini diikuti oleh 30 peserta dari 13 perguruan tinggi di Indonesia dari 9 kota. Salah satu hasil *workshop* ini adalah perumusan 23 proposal buku panduan literasi digital yang direncanakan akan disusun dan diproduksi oleh 23 perguruan tinggi dari 11 kota dalam kurun waktu 2018-2019.

Adapun buku panduan literasi digital yang sudah dirilis bersama di Kegiatan Peluncuran Seri Buku Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasi pada 26 September 2018 adalah:

1. *Yuk, Jadi Gamer Cerdas: Berbagi Informasi Melalui Literasi*  
Penulis: Ardian Indro Yuwono, Irham Nur Anshari, Rahayu, Syafrizal, Wisnu Martha Adiputra  
Penerbit: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada  
Pranala: <http://literalsidigital.id/books/yuk-jadi-gamer-cerdas-berbagi-informasi-melalui-literasi/>
2. *Yuk, Tanggap dan Bijak Berbagi Informasi Bencana Alam Melalui Aplikasi Chat*  
Penulis: Novi Kurnia, Zainuddin Muda Z. Monggilo, Wisnu Martha Adiputra  
Penerbit: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada  
Pranala: <http://literalsidigital.id/books/yuk-tanggap-bijak-berbagi-informasi-bencana-alam-melalui-aplikasi-chat/>
3. *Literasi Game untuk Remaja & Dewasa*  
Penulis: Yudha Wirawanda, Sidiq Setyawan  
Penerbit: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta - Lembayung Embun Candikala  
Pranala: <http://literalsidigital.id/books/literasi-game-untuk-remaja-dewasa/>
4. *Digital Parenting: Mendidik Anak di Era Digital*  
Penulis: Dyna Herlina, Benni Setiawan dan Gilang Adikara

Penerbit: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta  
- Samudra Biru

Pranala: <http://literasidigital.id/books/digital-parenting-mendidik-anak-di-era-digital/>

5. *Muslim Milenial Ramah Digital*

Penulis: Yanti Dwi Astuti, Rika Lusri Virga, Lukman Nusa, Rama Kerta Mukti, Fajar Iqbal, Bono Setyo

Penerbit: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pranala: <http://literasidigital.id/books/muslim-millennial-ramah-digital/>

Tujuan dari penerbitan serial buku panduan Japelidi ini adalah untuk menyediakan pustaka yang memadai sekaligus aplikatif sehingga bisa diterapkan secara langsung oleh kelompok sasaran yang dituju. Dengan begitu, buku-buku tersebut bisa dimanfaatkan untuk baik akademisi, pegiat maupun kelompok sasaran kegiatan literasi digital.

Atas terbitnya serial buku panduan literasi digital Japelidi, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan seluruh pihak yang terlibat. Semoga buku-buku ini berhasil menjadi bagian dari peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Koordinator Japelidi

Novi Kurnia

## DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI UGM

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat dalam satu dekade terakhir ini. Dampaknya luar biasa. Masyarakat Indonesia seperti tergegap mengejar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam beragam sisi. Media baru berkembang tidak lagi sekadar menjadi pendistribusi informasi yang cepat, murah, dan handal, melainkan menjadi arena di mana beragam individu saling berkomunikasi, beropini, dan berekspresi. Media baru adalah wilayah baru yang menjadikan individu harus menguasai kompetensi tertentu agar bisa terus bertahan dan mengambil manfaat dari wilayah tersebut.

Sayangnya, banyak individu justru mendapatkan dampak negatif dari kehadiran media baru. Bukti-bukti terungkap di sana-sini. Tersebarnya hoaks, berita rekayasa, dan ujaran kebencian adalah beberapa di antaranya. Belum lagi pencurian data personal, transaksi *online* ilegal, dan *cyberbully*. Artinya, di tengah keyakinan bahwa media baru akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat, terungkap fakta akan dampak negatifnya. Media baru berdampak sekaligus di dua sisi. Dengan demikian, literasi digital sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk meningkatkan beragam kompetensi dalam menggunakan media baru. Departemen Ilmu Komunikasi UGM memiliki kewajiban moral untuk ikut serta dalam upaya meminimalkan dampak negatif tersebut demi kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagai sebuah departemen dengan prinsip *crafting well-informed society*, Departemen Ilmu Komunikasi UGM memiliki beragam upaya sistematis untuk ikut berperan dalam menyongsong masyarakat informasi di Indonesia. Untuk mengampanyekan literasi digital dan memperkuat peran *civitas academica* dalam masyarakat, Departemen Ilmu Komunikasi UGM bersama dengan Japelidi dalam dua tahun terakhir ini berupaya mengelaborasi literasi digital. Japelidi adalah komunitas yang sebagian besar terdiri dari staf pengajar di berbagai kampus dan elemen yang lain. Japelidi

berupaya berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar masyarakat Indonesia yang telah menuju masyarakat digital mendapatkan manfaat optimal dari perkembangan media baru.

Departemen Ilmu Komunikasi UGM melalui Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi, menjalankan program khusus untuk mengembangkan literasi digital, yaitu program Pengabdian Masyarakat untuk mengenalkan literasi digital pada berbagai komunitas, antara lain di bidang pendidikan. Selain itu, secara aktif Departemen Ilmu Komunikasi UGM bersama Japelidi berkolaborasi untuk merancang dan menyusun buku panduan. Secara akumulatif, Japelidi menyusun dua puluh tiga buku panduan literasi digital. Departemen Ilmu Komunikasi UGM sendiri sejauh ini telah menerbitkan dua buku panduan literasi digital, yaitu literasi digital untuk *game* daring dan literasi digital untuk bencana alam. Panduan literasi digital melawan hoaks politik ini adalah yang ketiga. Paling tidak ini adalah sebuah langkah konkret Departemen Ilmu Komunikasi UGM memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika media baru dan masyarakat informasi.

Semoga buku panduan yang dirilis ini dapat mencapai harapan kita bersama dalam mewujudkan masyarakat informasi yang bermartabat.

Salam literasi digital.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UGM  
Muhamad Sulhan

# DAFTAR ISI

Prakata Gerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasi .....	i
Prakata Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) .....	iii
Prakata Departemen Ilmu Komunikasi UGM .....	vi
Hoaks Politik dan Pemilu di Indonesia .....	1
Mengenal Sepuluh Tahapan Kompetensi Literasi Digital Japelidi .....	10
Kompetensi Pertama: Akses .....	17
Kompetensi Kedua: Seleksi .....	20
Kompetensi Ketiga: Paham .....	22
Kompetensi Keempat: Analisis .....	27
Kompetensi Kelima: Verifikasi .....	30
Kompetensi Keenam: Evaluasi .....	34
Kompetensi Ketujuh: Distribusi .....	37
Kompetensi Kedelapan: Produksi .....	40
Kompetensi Kesembilan: Partisipasi .....	42
Kompetensi Kesepuluh: Kolaborasi .....	44
Bersikaplah Kritis, Lawan Hoaks Politik, Ciptakan Pemilu Damai .....	49
Daftar Pustaka .....	53
Tentang Penulis .....	56

The background of the image is a solid blue color with a pattern of thin, parallel, light blue diagonal lines that create a sense of movement and depth. The lines are spaced evenly and run from the top-left towards the bottom-right.

# **HOAKS POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA**

# HOAKS POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

Sejak Reformasi hadir pada tahun 1998, politik semakin memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya politik dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Politik adalah area yang berkaitan dengan elite pada masa sebelum Reformasi. Ketika keran demokrasi terbuka pada tahun 1998, politik kemudian menjadi area yang dimiliki seluruh warga, kebebasan berekspresi dan beropini dijamin oleh konstitusi, juga kemerdekaan pers dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Jika dibandingkan dengan awal mula mencuatnya demokrasi di tahun 1998, kemungkinan besar tahun 2019 ini adalah tahun yang paling meriah dan digelari sebagai tahun politik. Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 ini adalah kali pertama diadakannya semua jenis pemilihan pada waktu yang bersamaan, yaitu pemilihan calon legislatif untuk DPR tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Tahun 2019 disebut sebagai tahun politik juga karena kemeriahan yang hadir dalam waktu yang lama di media sosial. Pesta demokrasi pada tahun 2019 seakan-akan ditunggu oleh seluruh warga, terutama warganet. Kemeriahan tersebut ditunjukkan melalui antusiasme warganet terhadap berbagai informasi tentang pemilu. Produksi, distribusi, dan akses informasi warganet tentang pemilu meningkat tajam. Sayangnya, antusiasme tersebut kemudian bergerak ke arah yang negatif. Antusiasme dan kebutuhan akan informasi mengarah pada produksi dan distribusi informasi bohong atau hoaks.

Hoaks tersebut berwujud informasi bohong pada hampir seluruh jenis informasi, mulai dari bencana, penculikan, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, jenis hoaks yang marak dan perlu diantisipasi adalah hoaks politik. Hoaks politik tidak hanya berkaitan dengan pemilu secara langsung namun juga hal yang berkaitan dengan politik umum namun tetap dibelokkan ke arah pemilu 2019.

Pengertian hoaks politik sendiri tidak bisa dilepaskan dari definisi politik. Politik secara umum dapat didefinisikan melalui empat cara yaitu politik sebagai seni dari pemerintahan, politik sebagai ragam permasalahan publik, politik sebagai kompromi dan konsensus, dan politik sebagai kekuasaan.<sup>i</sup> Berdasarkan ragam definisi tersebut, politik tidak hanya berkaitan dengan lembaga-lembaga formal, melainkan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga.<sup>ii</sup> Dengan demikian aktivitas yang berkaitan dengan politik bukan hanya milik elite atau aktor-aktor politik melainkan milik seluruh warga masyarakat. Politik adalah bidang yang menjadi hak semua warga untuk terlibat di dalamnya. Hal ini adalah prinsip dasar dari demokrasi.

Politik pada masa kini adalah aktivitas kehidupan sehari-hari yang sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1998. Walau begitu, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan dalam prosesnya.

Proses demokratisasi Indonesia memiliki beberapa problem di antaranya adalah peran parlemen, partai politik, dan masyarakat sipil, juga relasi lokal dan pusat masih timpang, serta pelaksanaan pemilu, baik pemilihan anggota legislatif di berbagai tingkat ataupun pemilihan kepemimpinan nasional.<sup>iii</sup> Pemilu adalah problem yang menjadi fokus pada tahun 2019 ini.

Salah satu penanda demokrasi yang baik adalah pemilihan pemimpin formal, mulai dari pemilihan kepala daerah sampai pemilihan wakil rakyat, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu yang sering kali disebut sebagai pesta demokrasi tidak terasa sebagai pesta karena situasinya terasa tegang, tidak nyaman, dan memanas.

Semestinya komunikasi politik yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah wujud demokrasi itu sendiri, yaitu keterbukaan dan

ketersediaan informasi bagi seluruh warga masyarakat. Komunikasi politik sendiri dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi dalam konteks kepentingan dan kekuasaan. Komunikasi politik adalah proses produksi, distribusi, dan akses informasi antara aktor-aktor politik, media dan warga.<sup>iv</sup>

Selain menghubungkan aktor politik, media, dan warga, komunikasi politik memiliki karakter lain, yaitu politik juga terjadi di arena platform media, teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor utama dalam komunikasi politik terkini, yang pada gilirannya menjadikan informasi dan konten lebih beragam.

Karakter berikutnya adalah komunikasi politik yang menjadi fenomena global dan kemungkinan komunikasi politik dibawa pada tujuan positif dan negatif.<sup>v</sup> Hal yang terjadi kemudian bisa dikatakan sebuah ironi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan media baru dalam proses komunikasi politik cenderung digunakan secara negatif.

Sayangnya, komunikasi politik yang terjadi sekarang ini secara umum bukanlah produksi, distribusi, dan pertukaran informasi yang berkualitas. Kenyataannya pada era pemilu kali ini telah terjadi beragam fenomena yang tidak kondusif, yaitu maraknya hoaks dan berita bohong (*fake news*), juga terjadi disinformasi dan misinformasi. Fenomena ini terjadi karena perkembangan media baru sejak awal dekade 1990-an yang menjadikan informasi sebagai elemen utama perkembangan peradaban atau seringkali disebut sebagai informasionalisasi.<sup>vi</sup>

Media baru membentuk berbagai jaringan sosial baru secara virtual yang dilandasi kreativitas dan kerja sama.<sup>vii</sup> Pada bidang politik yang berada dalam jaringan daring dan aktivisme daring menjadi hal yang inheren dalam demokrasi. Walaupun pada kenyataannya media baru dapat pula menjadi arena yang riuh tanpa substansi dan penengah. Lebih spesifik lagi, media baru memunculkan apa yang disebut sebagai media sosial. Media sosial menyatukan jaringan luring dan daring sekaligus menghubungkan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa walau tidak dapat dipungkiri

terkadang terdapat relasi yang tidak adil.<sup>viii</sup> Media sosial secara cepat mengubah karakter komunikasi politik dengan memunculkan arena baru yang mempertemukan berbagai opini dan kepentingan. Tantangan terbesar adalah keterlibatan dan partisipasi warga atas informasi dalam media sosial secara aktif dan keterkaitan aktor-aktor politik dengan warga secara digital.<sup>ix</sup>

Hoaks politik adalah jenis hoaks yang paling berpengaruh dalam kehidupan warga sekarang ini, terutama yang berkaitan dengan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang mengerucut pada dua pasangan calon. Hoaks kemudian memecah belah anak bangsa pada dua kubu yang saling bertentangan dan terus menerus mengulang perputaran hoaks dalam proses komunikasinya.

Hoaks bertema politik mendominasi distribusi disinformasi dan misinformasi di media sosial Indonesia menjelang Pemilu 2019 ini. Hal tersebut mulai terlihat sejak akhir tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil riset kajian tim Pengecekan Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), selama tahun 2018, terdapat 997 hoaks yang beredar di masyarakat. Dari jumlah tersebut, 488 hoaks adalah hoaks politik. Intensitas maraknya hoaks politik semakin terasa setelah penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada September 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Litbang Mafindo, Santi Indra Astuti.

Penyebabnya adalah pemilu yang semakin dekat sehingga tim masing-masing pasangan calon semakin intensif memproduksi dan mendistribusikan calonnya kepada calon pemilih. Demikian juga para pendukung keduanya, yang berlomba mencari atensi dari calon pendukung sehingga misinformasi dan disinformasi sangat mungkin terjadi.

Bukan berarti hoaks bertema selain politik tidak penting dibandingkan dengan hoaks politik. Semua jenis hoaks adalah negatif bagi masyarakat. Hal ini lebih disebabkan hoaks politik berpotensi mengurangi kualitas Pemilu 2019. Selain itu, semua jenis hoaks dengan beragam topik juga rawan ditarik ke ranah politik.

Hoaks sendiri adalah fenomena umum dan berkembang karena perkembangan media baru, dan juga disebar oleh politisi, media lama, media palsu, dan warganet. Media sosial sebagai salah satu bentuk media baru adalah elemen utama dari penyebaran hoaks.<sup>x</sup> Warganet yang tidak memahami literasi digital adalah faktor terbesar bagi tersebarnya hoaks. Hal ini disebabkan keterbatasan individu atas asupan informasi yang terlalu banyak yang tanpa dipilah dan dipilih, tidak mudahnya membaca agenda dari para aktor politik, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>xi</sup> Norma sosial untuk menyebarkan informasi yang dianggap baik misalnya, adalah salah satu contohnya walaupun tanpa verifikasi fakta terlebih dahulu. Hoaks yang menjadi bagian penting dalam era *post-truth* berkembang dengan ketiga cara tersebut.

Kenyataan ini bukan hanya spesifik Indonesia, secara umum di seluruh dunia memasuki era *post-truth* dan politik identitas. Terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat dan Jair Bolsonaro di Brasil disinyalir menggunakan berbagai taktik komunikasi politik berbasis politik identitas. Pada pemilu di kedua negara tersebut juga benar-benar berada dalam era *post-truth* dengan cirinya kebenaran dan fakta menjadi tidak penting lagi. Opini dan emosi berdasarkan kesamaan identitas adalah hal yang digunakan untuk menarik pemilih dalam pemilu.

Di Indonesia berbagai taktik era *post-truth* yang digunakan sebenarnya sudah terjadi. Kasus munculnya Obor Rakyat pada pemilu 2014 adalah salah satu contoh fenomena *post-truth* di Indonesia yang pada tahun-tahun kemudian justru semakin marak bukannya semakin mereda. Polarisasi kedua kubu kandidat calon pemimpin nasional dalam pemilu yang menjadikan produksi dan distribusi hoaks politik tidak juga mereda. Hoaks politik juga selalu mewarnai debat panas dan tak berujung di media sosial antara *cebong* vs. *kampret*, sebutan untuk pendukung kedua pasangan calon yang berkompetisi.

Hal yang menyedihkan adalah persaingan tersebut tidak hanya panas di media sosial melainkan sudah memakan korban jiwa. Peristiwa di Sampang,

Madura, Jawa Timur, menunjukkan hal tersebut. Diawali oleh saling menghina di media sosial, dua warga kemudian berkelahi dan salah satu warga kemudian terbunuh.<sup>xii</sup> Sudah cukup banyak perbedaan pilihan mendorong saling serang dan menghina di media sosial dan nyaris memunculkan konflik terbuka secara langsung, namun peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa adalah kejadian di Sampang tersebut.

Selain itu muncul juga banyak hoaks politik lain yang berpotensi mengganggu kondisi yang kondusif menjelang pemilu. Pertama, Ratna Sarumpaet dipukuli, hoaks ini adalah hoaks politik pertama dan terbesar setelah kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan.<sup>xiii</sup>

Ratna Sarumpaet yang waktu itu merupakan tim sukses salah satu pasangan calon mengaku dipukuli sejumlah orang di Bandung. Setelah penyelidikan polisi, Ratna kemudian mengaku bahwa dia berbohong padahal isu pemukulan tersebut telah digunakan untuk menyerang salah satu calon.

Hoaks politik lain yang juga menarik perhatian adalah berita tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos yang ditemukan di Tanjung Priok. Seperti halnya hoaks politik, berita bohong ini bertujuan untuk mendelegitimasi salah satu pasangan calon dan penyelenggara pemilu. Ironisnya, hoaks ini turut disebar oleh para politisi melalui media sosial dengan berpura-pura mencari klarifikasi.<sup>xiv</sup>

Berdasarkan penyebaran hoaks politik dan dampak negatifnya, negara dianggap belum melakukan antisipasi dan sanksi bagi penyebaran hoaks padahal dampak negatifnya sudah terlihat. Antisipasi oleh pemerintah, yaitu melalui Kominfo dianggap belum cukup untuk mengantisipasi penyebaran hoaks karena sifatnya masih kuratif dan belum preventif.

Walau demikian, sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan juga organisasi media, misalnya saja upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Aktivitas mereka sedikit banyak membantu munculnya kesadaran di benak masyarakat akan bahaya hoaks. Begitu juga yang dilakukan oleh berbagai institusi media

walau semua belum terverifikasi pada International Fact-Checking Network (IFCN) yang dikembangkan oleh Poynter Institute.

Kita dapat belajar dari negara lain dalam mengantisipasi dan memberikan sanksi kepada pelaku penyebaran hoaks, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menyadari dampak hoaks yang merusak, berbagai pihak di sana mendorong antisipasi dan sanksi bagi penyebaran hoaks. Salah satu upaya yang sangat serius dalam mengantisipasi hoaks adalah hoaks di media massa. Dua bidang yang berkaitan dengan media dan hoaks adalah jurnalisme dan penyiaran.

Di bidang jurnalisme disadari kualitas berita yang menurun adalah salah satu penyebab hoaks dipercaya. Berdasarkan riset Pew Research Centre pada tahun 2017, masyarakat Amerika Serikat yang mengakses berita melalui media sosial meningkat dengan drastis, sekitar 38% dan menjadi sumber utama kedua setelah organisasi media itu sendiri yang berjumlah sekitar 40%. Sementara itu, berdasarkan riset Gallup pada tahun 2016, kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap media juga menurun drastis bila dibandingkan dengan dekade awal 200-an. Berdasarkan alasan tersebut, masyarakat jurnalisme di Amerika menyarankan kepada pemerintah dan industri media untuk meningkatkan kualitas jurnalisme melalui regulasi yang mengurangi tekanan politik dan ekonomi terhadap jurnalis. Industri media juga diharuskan menghindari berita palsu dan upaya disinformasi. Harapan juga diberikan kepada industri teknologi untuk mengaplikasikan berbagai program anti hoaks dan antisipasinya.<sup>xv</sup>

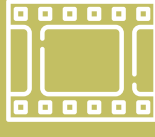
Di bidang penyiaran, upaya telah dilakukan oleh Federal Communications Commission (FCC) yang menyadari bahwa radio siaran dan televisi adalah juga penyebar hoaks yang potensial. Izin siaran dapat dibekukan bila pemilik izin siaran menyebarkan hoaks yang sudah diketahui bahwa informasinya palsu, lembaga penyiaran juga mengetahui bahwa informasi tersebut akan menyebabkan kepanikan publik, dan lembaga penyiaran telah menyiarkan informasi yang benar-benar membuat kepanikan publik. Aturan ini

terdapat dalam aturan FCC bagian 73.

Aturan ini memungkinkan FCC memberikan pembekuan ijin dan lembaga penyiaran yang bersangkutan tidak dapat memperoleh ijin baru dalam waktu satu dekade. Pembekuan tersebut dapat terjadi bila lembaga penyiaran berulang-kali melakukan pelanggaran yang sama.

Institusi media bagaimana pun juga adalah elemen penting bagi komunikasi politik yang demokratis, apalagi di Indonesia media menjadi bagian yang penting dari terjadinya ketimpangan informasi. Indonesia sebagai sistem komunikasi yang terintegrasi, demokratis dan adaptif belum dapat terwujud.<sup>xvii</sup> Regulasi komunikasi di Indonesia masih belum terintegrasi antara media lama dan media baru, belum mampu menempatkan regulasi komunikasi untuk kepentingan warga secara optimal, dan belum dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat.

Selain itu, relasi kuasa pada era media baru juga masih berada pada kelompok penguasa yang sebelumnya menguasai media lama. Sulit untuk memberikan proses komunikasi melalui media baru yang berpihak pada publik karena kelindan politik, ekonomi, dan sosiokultural sejak lama tidak berpihak pada masyarakat.<sup>xviii</sup>



# MENGENAL SEPULUH TAHAPAN KOMPETENSI LITERASI DIGITAL JAPELIDI

Terdapat dua fenomena yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam satu dekade terakhir ini. Pertama, warga masyarakat yang semakin terbuka menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Hal ini adalah buah dari Reformasi yang kita rasakan hampir dua dekade ini. Masyarakat menyadari hak-hak politiknya, antara lain kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga kebebasan berserikat dan berkumpul.

Fenomena kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan media baru yang semakin pesat. Dimulai dari penggunaan *mailing list* untuk berdiskusi dan pada akhirnya mendorong runtuhnya rezim Orde Baru sampai dengan pada kelahiran dan perkembangan media sosial pada tahun 2007 yang turut mempengaruhi wajah politik Indonesia sekarang ini.

Salah satu bentuk media baru yang paling mudah diamati dan menjadi landasan bagi teknologi informasi dan komunikasi adalah internet. Walau masih belum merata penggunaannya, internet turut mempengaruhi perkembangan politik dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum.

Perkembangan pengguna internet di Indonesia termasuk cepat. Pada tahun 2017 jumlah pengguna internet diperkirakan sekitar 50% dari 262 juta penduduk Indonesia atau sekitar 153,3 juta jiwa. Terdapat kenaikan sekitar 20 juta jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 132,7 juta jiwa. Berdasarkan usia pengguna internet di Indonesia, pengguna dalam kategori usia 19–34 tahun adalah sekitar 49,52%, usia 13–18 tahun adalah 16,68%, dan usia 35–54 tahun adalah sekitar 29,55%.<sup>xix</sup> Dengan demikian penduduk berusia muda adalah pengguna terbesar dari media baru. Data ini semakin menunjukkan arti penting literasi digital bagi penduduk berusia muda sebagai kelompok warga yang sangat dekat dengan konteks kebebasan dan keterbukaan.

Keterbukaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan banyaknya pengguna internet berusia muda adalah tiga faktor yang menentukan, bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana bagi demokrasi yang kita rasakan sekarang ini. Salah satu kunci dari relasi ketiganya adalah penguasaan literasi digital yang masih minim pada warga, terutama warga berusia muda.

Selama ini literasi digital sebagai sekumpulan kompetensi dalam berinteraksi dengan media baru atau media digital belum sepenuhnya dikuasai oleh warga masyarakat Indonesia. Ketidapahaman tersebut menyebabkan efek negatif dari media baru lebih sering muncul di kalangan warga, misalnya saja produksi dan distribusi hoaks yang semakin marak terjadi mendekati tahun politik, yaitu tahun 2019, atau bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk menghina dan menistakan kelompok lain yang berbeda. Warganet bukannya menjadi agen yang mendorong perubahan yang lebih baik, warganet justru menjadi pihak yang turut menyebarkan efek negatif dari media baru, antara lain penyebaran hoaks.

Tindakan yang keras dan berfokus pada pelarangan akses media baru tentu saja sulit atau bahkan tidak bisa dilakukan pada era demokrasi seperti sekarang. Tindakan pemberian sanksi yang tegas sedikit banyak memberikan efek jera, namun penyebar hoaks terus-menerus hadir dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa politik.

Cara paling tepat yang bisa dilakukan oleh negara dan pemerintah adalah menyebarkan pendidikan mengenai literasi digital pada warga Indonesia, terutama bagi warga berusia muda. Hal ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi yang dinikmati oleh warga Indonesia sejak tahun 1998.

Sayangnya, setelah dua dekade era demokrasi berjalan, literasi digital belum sepenuhnya berkembang di masyarakat. Berdasarkan riset Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) pada tahun 2017, kegiatan yang berkaitan dengan literasi digital di Indonesia masih lebih banyak berfokus di lembaga

pendidikan, bukan di masyarakat. Selain itu, kegiatan literasi digital masih berlangsung pada tahap pengenalan dengan metode penyuluhan pada target sasaran yang bersifat umum. Literasi digital belum berfokus pada lahirnya serangkaian kompetensi pada warga.<sup>xx</sup>

## Memahami Literasi Digital

Perkembangan media baru yang dimulai dari internet dalam bentuknya yang paling awal sampai dengan yang paling mutakhir, media sosial sekarang ini, menunjukkan bahwa media baru berkembang dengan dinamis.

Berdasarkan perkembangannya, terdapat tiga fase perkembangan internet sampai dengan munculnya media sosial. Perkembangan dimulai dengan fase *web 1.0*, yaitu sistem berjaringan berbasis komputer dari kognisi manusia. Internet pada zaman ini tidak berbeda jauh dengan media massa yang lebih berfungsi mendistribusikan konten dan tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain berperan dalam produksi konten yang sama. Fase selanjutnya *web 2.0* adalah sistem berjaringan berbasis komputer dari komunikasi manusia. Pada fase ini internet memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung berbagai pihak secara fleksibel. Fase *web 3.0* adalah sistem berjaringan berbasis komputer dari kerja sama (*co-operation*) manusia. Era berbagi melalui berbagai aplikasi dan media sosial termasuk dalam fase terakhir dari perkembangan internet.<sup>xxi</sup>

Literasi digital berkaitan dengan media baru yang memiliki karakter sebagai berikut: (1) *digitization* dan konvergensi; (2) interaktivitas; dan (3) *network* dan *networking*.<sup>xxii</sup> Ketiga karakter tersebut adalah fungsi yang memperluas fungsi media massa. Bahkan sekarang ini sedang berkembang fase keempat dan kelima dari media baru yang menempatkan data dan relasinya dengan berbagai benda semakin erat, serta penempatan kembali manusia sebagai fokus dari perkembangan teknologi.

Literasi digital, seperti halnya literasi media, memiliki tiga elemen<sup>xxiii</sup>, yaitu: kompetensi atau kecakapan yang mesti dimiliki oleh individu ketika

mengakses media baru. Kompetensi ini adalah unsur yang pertama dan juga yang terpenting. Unsur yang kedua adalah lokus personal. Literasi digital berguna ketika individu memerlukannya. Misalnya, literasi game daring akan lebih berguna untuk para remaja yang mengakses game daring, bukan untuk orang dewasa yang tidak atau jarang mengakses game daring. Ketika berhadapan dengan media baru, individu dapat memiliki tiga posisi, yaitu: individu yang termediasi, individu yang virtual, dan individu yang berjaringan, yaitu individu yang potensial berbagi dan kolaborasi dengan individu lain melalui media baru.<sup>xxiv</sup> Unsur ketiga adalah struktur pengetahuan. Literasi digital pada akhirnya akan menjadikan individu memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi dan dunia sosial yang dijalaninya, termasuk dalam relasi politik praktis yang sekarang ini sedang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

## **Sepuluh Tahapan Kompetensi Literasi Digital**

Kompetensi adalah elemen terpenting dalam literasi digital. Kompetensi dapat dipelajari dan dikuasai oleh individu. Kompetensi juga merupakan keterampilan yang bertahap, di mana penguasaan kompetensi yang lebih mendasar diperlukan untuk menguasai kompetensi selanjutnya. Kompetensi literasi digital terdiri dari dua jenis, yaitu literasi digital fungsional dan literasi digital kritis.<sup>xxv</sup>

Walaupun bersumber utama dari artikel Chen, Wu, dan Wang, Japelidi melakukan *review* khusus dengan memberikan penekanan yang berbeda pada masing-masing kompetensi dan memberikan nama baru untuk kompetensi kesembilan dan kesepuluh. Selain itu, Japelidi lebih menempatkan kompetensi literasi digital sesuai dengan konteks manusia Indonesia yang menempatkan relasi sosial sebagai fokus dalam kehidupan.

Berikut ini adalah sepuluh kompetensi literasi digital yang digunakan di dalam buku panduan ini:<sup>xxvi</sup>

01	Mengakses	06	Mengevaluasi
02	Menyeleksi	07	Mendistribusikan
03	Memahami	08	Memproduksi
04	Menganalisis	09	Berpartisipasi
05	Memverifikasi	10	Berkolaborasi

**Kompetensi pertama adalah mengakses.** Kompetensi mengakses mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Contohnya adalah seorang individu membutuhkan informasi mengenai cara mengoperasikan komputer atau telepon genggam sebelum mengolah konten yang akan diunggah di media baru, bagaimana cara untuk mencari/menemukan informasi yang diperlukannya, bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terbaru (misalnya aplikasi media sosial dan mengisi *polling* elektronik), dan sebagainya.

**Kompetensi kedua adalah menyeleksi.** Kompetensi ini adalah kemampuan individu untuk memilih dan memilah informasi yang didapatkannya dari media baru. Individu yang menguasai kompetensi ini akan membuang informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak benar. Misalnya saja, individu akan mencari informasi lebih mendalam bila informasi yang didapatkannya pertama-kali adalah informasi yang meragukan.

**Kompetensi ketiga adalah memahami.** Memahami adalah kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten di media baru pada tingkat literal. Contohnya kemampuan untuk menangkap pesan orang lain, juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada *platform* yang berbeda (misalnya buku, video, *blog*, *Facebook*, dll), dan untuk menafsirkan makna dalam bentuk pendek baru atau *emoticon*.

Secara khusus, individu harus mampu bereksperimen dengan

lingkungan mereka untuk memecahkan masalah, untuk menafsirkan dan membangun model dinamis, untuk memindai lingkungan mereka dan pergeseran fleksibel ke informasi penting, dan untuk menangani arus informasi di berbagai jenis dan media.

Contoh yang bisa digunakan dalam kompetensi ini adalah individu mengetahui konvensi ketika bergabung dengan suatu grup dalam aplikasi berbincang. Individu yang paham akan mengerti informasi yang boleh dan tidak boleh disampaikan dalam grup.

**Kompetensi keempat adalah menganalisis.** Kompetensi keempat ini mengacu pada kemampuan individu untuk mendekonstruksi konten di media baru. Kompetensi ini dapat dilihat sebagai analisis tekstual semiotik yang berfokus pada bahasa, genre, dan kode beberapa jenis dan media.

Kompetensi ini menjadikan individu menyadari cara produksi konten, format fakta atau kreativitas (misalnya pengembangan konten media yang menggunakan bahasa kreatif dengan aturan tertentu), dan pengguna memahami batas memaknai suatu informasi dan tidak membawanya melampaui konteks yang tidak relevan (misalnya interpretasi pesan media akan bervariasi pada seluruh individu) ketika mereka mendekonstruksi pesan media.

Kompetensi ini secara konsisten menekankan bahwa individu seharusnya tidak hanya melihat konten di dalam media baru sebagai pengamat netral realitas, tetapi mengakui produksi konten sebagai proses subyektif dan sosial.

**Kompetensi kelima adalah memverifikasi.** Memverifikasi adalah hal yang kompleks dan mengacu pada kemampuan individu untuk menggabungkan konten di media baru dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri dan juga untuk merekonstruksi pesan media. Misalnya, individu diharapkan untuk membandingkan berita dengan tema yang sama dari sumber yang berbeda. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil cuplikan beragam konten dan

menggabungkannya dengan makna tertentu. Ketika individu memadukan konten media, mereka akan menghargai “struktur dan makna terpendam” dari konten atau bahasa.

**Mengevaluasi adalah kompetensi yang keenam.** Kecakapan ini mencakup kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menguji kredibilitas konten di media baru. Kecakapan ini merupakan kecakapan dengan level yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kecakapan sebelumnya dan membutuhkan kritisisme individu penggunaannya.

Kecakapan ini membutuhkan kemampuan individu untuk memaknai konten di media baru dengan mempertimbangkan isu-isu seperti identitas, relasi kuasa, dan ideologi. Lebih penting lagi, evaluasi juga melibatkan proses pengambilan keputusan.

Misalnya, membandingkan harga dari produsen konten yang berbeda melalui media sosial adalah tindakan sintesis, sementara membuat keputusan produsen konten mana yang kemudian dipercaya adalah wujud dari tindakan evaluasi.

**Kompetensi berikutnya adalah mendistribusikan.** Kompetensi mendistribusikan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi yang ada di tangan mereka. Dibandingkan dengan kecakapan prosumsi, kecakapan ini biasanya melibatkan proses berbagi.

Contoh yang relevan termasuk kemampuan individu untuk menggunakan fungsi *built-in* pada situs jaringan sosial untuk berbagi perasaan mereka (misalnya seperti suka/tidak suka), untuk berbagi pesan media, dan untuk menilai/orang untuk produk/jasa. Kecakapan ini juga berfokus pada kemampuan untuk mencari, mensintesis, dan menyebarkan informasi dalam jaringan khususnya jaringan daring.

**Kompetensi kedelapan adalah memproduksi.** Kecakapan ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasi (sebagian atau seluruhnya) konten. Tindakan produksi termasuk pemindaian (atau menyetik) dokumen *hardcopy* ke dalam format digital, memproduksi klip video dengan

menggabungkan gambar dan materi audio, dan menulis daring melalui *blog*, aplikasi berbincang atau platform media sosial. Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi secara bermakna dengan perangkat yang memperluas kapasitas mental, juga pada kemampuan untuk menangani alur informasi dan narasi di beberapa jenis konten dan sumber media.

**Kompetensi kesembilan adalah berpartisipasi.** Kecakapan ini dekat dengan budaya partisipatif yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Misalnya, individu diharapkan untuk secara aktif ikut membangun dan memperbaiki salah satu ide-ide orang lain dalam media platform tertentu (misalnya *blog*, *chat room*, Skype, Facebook, dll). Dengan kata lain, kecakapan ini menyatukan pengetahuan dan membandingkan catatan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Kompetensi berpartisipasi akan membutuhkan keterlibatan individu yang konstan dan interaktif untuk mengonstruksi atau membangun konten. Dibandingkan dengan delapan kecakapan sebelumnya, berpartisipasi berfokus secara eksplisit pada koneksi sosial yang menghargai kontribusi masing-masing individu.

**Kompetensi kesepuluh atau terakhir adalah berkolaborasi.** Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk membuat konten di media baru, terutama berkaitan dengan pemahaman kritis dan mengacu pada nilai-nilai sosial budaya dan masalah ideologi. Tidak seperti kecakapan berpartisipasi, kecakapan berkreasi biasanya membutuhkan inisiatif dari individu sendiri dibandingkan dengan interaksi bilateral antara individu. Misalnya, inisiasi pertama dari sebuah *thread* dengan kekritisannya akan penciptaan; sedangkan refleksi berikutnya (komentar/reaksi dari *thread* tersebut) akan dilihat sebagai tindakan partisipasi.

KOMPETENSI  
PERTAMA



**AKSES**

# AKSES

Informasi dan berita politik, seperti pemilihan presiden dan calon presiden, menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ketertarikan ini berdampak pada meningkatnya akses terhadap media. Internet, portal media daring dan media sosial, untuk saat ini, nampaknya menjadi sumber rujukan utama masyarakat dalam mengakses informasi dan berita politik. Fenomena ini telah menggeser fungsi surat kabar cetak dan juga media penyiaran sebagai sumber berita. Sayangnya, informasi yang tersebar melalui internet, portal media daring dan media sosial tidak selalu benar. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakannya untuk menyebarkan hoaks. Sementara itu, belum banyak anggota masyarakat yang mengetahui dan memahami hoaks. Keberadaan hoaks telah terbukti mengancam masyarakat. Hasil penelitian dan sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa hoaks telah mampu membentuk keyakinan yang salah, menimbulkan keresahan, konflik, perpecahan, dan bahkan menyebabkan pembunuhan.

Saat ini akses terhadap media untuk mendapatkan informasi dan berita bukan lagi menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Teknologi informasi yang berada di genggaman tangan memudahkan masyarakat mengakses maupun mendapatkan paparan informasi dan berita. Persoalan utama justru terkait dengan bagaimana masyarakat dapat mencari atau menemukan informasi dan berita yang benar? Informasi dan berita yang benar merupakan informasi dan berita yang disusun berdasarkan fakta, yang berarti bukan karangan atau rekayasa.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar. **Pertama, pahami secara teknis bagaimana mengakses informasi**

## dan berita politik melalui internet, portal media daring, aplikasi *chat* dan media sosial.

Dalam mengakses internet, Anda perlu memahami bagaimana menggunakan fitur pencarian Google, Yahoo, dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Anda perlu memperhatikan kata kunci. Penggunaan kata kunci yang tepat akan menentukan hasil pencarian, sementara penggunaan kata kunci yang tidak tepat akan memunculkan informasi yang tidak relevan, tidak dibutuhkan dan membuang waktu secara percuma.

Dalam mengakses portal media daring, **Anda perlu memperhatikan apakah portal yang Anda akses adalah portal resmi atau abal-abal.** Dewan Pers telah mengeluarkan daftar portal media daring yang telah diverifikasi. Portal yang lolos verifikasi ini dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dalam proses produksi berita dan pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat. Untuk mengetahui portal-portal tersebut, masyarakat dapat membuka website Dewan Pers pada bagian Data Perusahaan Pers atau mengikuti link <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>.

Di samping itu, **Anda juga perlu mengetahui siapa pemilik portal atau media.** Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menunjukkan bahwa portal atau media tertentu berpihak pada orang-orang atau calon-calon tertentu. Implikasi keberpihakan ini adalah portal atau media tidak lagi objektif dalam pemberitaan karena umumnya terlalu didominasi oleh sudut pandang atau pendapat dari pihak-pihak yang dibelanya.

Dalam mengakses aplikasi *chat*, **Anda perlu memperhatikan apakah aplikasi tersebut merupakan versi terbaru atau lama.** Umumnya, fitur-fitur terbaru yang ditawarkan dapat bekerja dengan optimal. Sebagai contoh, fitur baru di WhatsApp dapat digunakan untuk menghapus

pesan. Ketika Anda salah mengirimkan pesan maka Anda dapat menghapusnya sehingga tidak merugikan orang lain yang membacanya. Dalam menerima informasi dari aplikasi *chat*, terutama informasi yang memiliki kalimat-kalimat yang janggal dan hiperbolis, bernada memaksa (misalnya “viralkan”, “sebarakan”), dipenuhi huruf besar dan tanda seru, mengklaim sumber terpercaya, dsb. Anda perlu skeptis atau tidak serta merta mempercayainya. Untuk dapat memastikannya, Anda perlu melakukan verifikasi, misalnya dengan melakukan pengecekan informasi melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Informasi, [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks). Secara berkala, Kominfo membuat laporan tentang hoaks agar masyarakat terhindar dari informasi atau berita yang menyesatkan.

**Kedua, Anda perlu membiasakan mengakses dan merujuk informasi dan berita dari sumber resmi.** Sumber resmi di sini adalah informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah maupun non-pemerintah yang tugas dan wewenang memang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah tertentu. Misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang secara khusus menangani masalah pemilu. Dari lembaga ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang pemilu dan informasi lain tentang daftar calon, hoaks pemilu, dana kampanye, dsb.

Sebuah lembaga resmi sebelum mengeluarkan informasi telah mengolah informasi sedemikian rupa sebelum dipublikasikan secara luas sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Masing-masing lembaga umumnya memiliki kanal informasi yang terbuka untuk masyarakat, seperti situs web dan situs jejaring sosial resmi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya.

# KOMPETENSI KEDUA **SELEKSI**



# SELEKSI

Dalam waktu menjelang pemilu, hampir dapat dipastikan informasi politik membanjiri ruang berbagai media. Namun, tidak semua informasi merupakan informasi yang benar dan berguna bagi masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat, masyarakat perlu selektif dalam memilih informasi.

Bagaimana Anda dapat melakukan seleksi terhadap informasi politik sehingga tidak terjebak pada hoaks dan mendapatkan manfaat?

**Pertama, Anda perlu mengetahui informasi apa yang Anda butuhkan.** Jika Anda tidak ingin dibanjiri informasi maka Anda harus menetapkan informasi yang benar-benar Anda perlukan. Jangan biarkan diri Anda tenggelam dan hanyut dalam informasi yang tidak Anda butuhkan. Ini hanya akan menyita dan buang-buang waktu saja.

**Kedua, Anda perlu menggunakan kata kunci untuk mencari informasi.** Kata kunci ini akan membantu Anda mendapatkan informasi yang diperlukan. Meski membantu menyortir informasi, Anda tetap perlu selektif dalam melihat sumber informasi. Pastikan informasi yang hendak dibaca berasal dari sumber resmi atau sumber yang kredibel.

**Ketiga, jika informasi menyertakan data, sebaiknya Anda melakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya.** Untuk media

seperti portal berita daring yang kredibel biasanya menyediakan pranala agar pembaca dapat menelusuri data dari sumber aslinya.

### **Keempat, bedakan antara fakta dan opini.**

Fakta merujuk pada data atau kenyataan yang terjadi yang kebenarannya dapat dibuktikan. Sementara opini merupakan suatu pendapat, pandangan, atau pemikiran seseorang tentang sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.

**Kelima, sebaiknya Anda tidak selalu percaya pada satu informasi.** Informasi tertentu mengandung kepentingan dan sudut pandang penyusunnya. Sebaiknya Anda mencari informasi lain agar kaya perspektif.

Dalam situasi tertentu, kadang-kadang seseorang sulit untuk menghindari terpaan informasi politik. **Media sosial umumnya menyebarkan informasi politik yang tidak selalu dikehendaki. Untuk informasi yang serta merta hadir di hadapan Anda, tidak semua perlu diperhatikan. Biasakan untuk bersikap skeptis mempertanyakan kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Waspada hoaks. Media sosial terbukti menjadi wadah penyebaran hoaks.**

KOMPETENSI  
KETIGA  
**PAHAM**



# PAHAM

Kompetensi ketiga yang perlu Anda miliki agar terhindar dari jebakan hoaks politik adalah kompetensi dalam memahami. Kemampuan untuk memahami ini bisa diartikan dalam beberapa konteks berikut:

**Pertama, mengetahui dan memastikan bahwa apa pun informasi berbau politik yang diterima belum tentu sepenuhnya benar dan/atau salah.** Terkadang, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam

memahami informasi politik, umumnya seseorang akan dengan cepat mempercayai dan menyebarkannya kepada orang lain. Apalagi jika ternyata informasi tersebut dapat memenangkan posisinya dan menjatuhkan lawannya. Hal ini juga cenderung berlaku sama dengan hoaks politik. Pendukung akan dengan mudahnya meyakini dan mengungkit-ungkit hoaks terkait lawan dan dengan kerasnya menolak dan mengubur hoaks terkait kubunya.

Sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah *bad news is good news*. Hoaks politik ibarat berita buruk yang berisi rekaan/rekayasa oposisi mengenai kejelekan dan kebohongan terkait figur/tokoh tertentu yang disasar. Hoaks politik seumpama bumbu penyedap dalam masakan yang diracik sedemikian rupa sehingga yang mencobanya akan dengan gampangya terlena dan terpedaya. Hoaks politik dan unsur sensasionalisme yang menyertainya layaknya kerabat dekat yang memang sukar diceraiakan.

**Idealnya, seseorang dengan kemampuan memahami juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Dengan asas ini,**

**pemahaman Anda dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis** dan mungkin menumbuhkan posisi netral (aposisi) sehingga tidak terperangkap sebagai korban dan/atau pencipta hoaks. **Posisi yang sebenarnya menempatkan Anda sebagai pendukung yang cerdas dan terhormat karena tidak ternodai dengan bercak-bercak hoaks.**

**Kedua, memahami bahwasanya hoaks politik tidak selalu berkorelasi positif dengan kemenangan dan/atau kekalahan lawan.** Hasil riset terkini yang dirilis 8 Januari 2019 oleh Indikator Politik Indonesia membuktikan bahwa hoaks politik tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan elektabilitas capres dan cawapres di Pilpres 2019. Temuan ini juga menguatkan fakta bahwa hoaks politik hanya diterima dan berlaku secara parsial yaitu tidak dengan mudah menyusup dan mempengaruhi pilihan politik individu. Hoaks politik yang dibuat dan disebarkan cenderung hanya akan berakhir di kalangannya sendiri.<sup>xxvii</sup> Dengan kata lain, filter partisan memainkan peranan yang kuat untuk memutus rantai edar hoaks politik tersebut.

**Olehnya itu, perlu digarisbawahi bersama bahwa memproduksi dan menyebarkan hoaks politik hanyalah perbuatan yang sia-sia** karena tidak akan berdampak besar untuk mendongkrak elektabilitas dan kemenangan tokoh yang diperjuangkan. **Sebaliknya, aktivitas positif seperti menunjukkan praktik sukses (best practices) disertai dengan bukti-bukti riil adalah aktivitas yang harus terus diupayakan** karena sekaligus akan menjadi tabungan rekam jejak baik di masa sekerang dan yang akan datang.

## Ketiga, kemampuan untuk memahami bahwa membuat dan/atau menyebarkan hoaks (tidak hanya politik) adalah tindakan kriminal yang legal untuk dipidanakan menurut hukum yang berlaku.

Baru-baru ini, dunia perpolitikan Indonesia kembali diwarnai dengan hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos untuk capres dan cawapres nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok. Modus yang dilakukan Bagus Bawana Putra, pelaku utama yang membuat hoaks (*hoax creator*), adalah menggunggah hoaks tersebut ke Twitter dan mengedarkan rekaman 7 kontainer berisi surat suara tercoblos tersebut ke aplikasi pesan WhatsApp hingga akhirnya tersebar luas. Kepolisian berhasil menangkap pelaku dan tiga lainnya sebagai penyebar (*buzzer*) di tempat yang terpisah. Mereka terancam dikenai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.

Jeratan hukum untuk pembuat dan penyebar hoaks sesungguhnya sudah lama diperingatkan kepada masyarakat. Penyebar berita hoaks dapat dikenai sanksi pidana dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan sanksi 2, 3, bahkan 10 tahun sesuai dengan jenis pelanggarannya berikut:

Tabel 1. Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hoaks

Kategori Pelanggaran Hoaks	Sanksi	Dasar Hukum
Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran	2 Tahun	Pasal 15
Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita itu bohong	3 Tahun	Pasal 14 ayat (2)
Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat	10 Tahun	Pasal 14 ayat (1)

Sumber: Hukum Online<sup>xxviii</sup>

Selain menginduk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kepolisian RI juga tidak segan-segan untuk menghukum penyebar hoaks di situs jejaring sosial dan internet melalui Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ayat 1 mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kebencian dan ayat 2 melarang segala bentuk tindakan yang menyulur kebencian atau permusuhan antarkelompok berdasarkan SARA.

Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah menetapkan hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyebaran hoaks melalui pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukumannya meliputi hukuman disiplin ringan dan berat sebagai berikut:

Tabel 2. Sanksi terhadap ASN yang terlibat penyebaran hoaks

Jenis Sanksi	Sanksi	Dasar Hukum
Hukuman Disiplin Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teguran lisan</li> <li>• Teguran tertulis</li> <li>• Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ul>	Pasal 7 ayat (2) PP No.53 Tahun 2010
Hukuman Disiplin Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun</li> <li>• Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>• Pembebasan dari jabatan</li> <li>• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ul>	Pasal 7 ayat (4) PP No.53 Tahun 2010

Sumber: Hukum Online<sup>xxix</sup>

**Dengan demikian, pemahaman akan sanksi hukum yang mengintai ini sedianya menjauhkan Anda dari segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan hoaks dan/atau ujaran kebencian.** Informasi yang Anda produksi, konsumsi, dan distribusi khususnya dalam media daring seperti situs jejaring sosial, *blog*, portal berita

daring, dan pesan berantai (*broadcast message*) melalui aplikasi *chat* adalah **informasi yang perlu dimaknai secara hati-hati dan tidak disebarluaskan secara serampangan baik sengaja maupun tidak disengaja karena sadar akan konsekuensi yang bisa timbul karenanya.** Anda tentu tidak ingin merasakan sesaknya mendekam dibui akibat hoaks atau ujaran kebencian politik atas nama fanatisme politik yang keliru.

KOMPETENSI  
KEEMPAT  
**ANALISIS**



# ANALISIS

Kompetensi keempat yang juga tidak kalah penting untuk diimplementasikan adalah kompetensi untuk menganalisis hoaks politik. Kemampuan analisis ini diartikan sebagai pola pikir analitis dalam menyelidiki suatu informasi politik yang bisa saja tidak sepenuhnya benar karena mengandung hoaks. Di samping itu, kemampuan menganalisis juga bermakna kapasitas dalam menimbang sisi positif dan sisi negatif dari informasi yang sudah dipilih dan dipahami atas dasar penyelidikan yang relevan. Pola pikir analitis ini pada gilirannya akan mendorong terwujudnya sikap yang lebih teliti dan bijak dalam membuat, memanfaatkan dan menyebarkan informasi politik secara spesifik melalui media daring.

Bagaimana agar pola berpikir analitis ini dilakukan untuk menangkal hoaks politik? Berikut beberapa langkah mendasar yang perlu diperhatikan.

**Pertama, hoaks termasuk hoaks politik biasanya dicirikan dengan penggunaan kata atau kalimat yang cenderung hiperbolis dan sensasional.** Maka tak jarang akan terdapat seruan-seruan yang provokatif karena bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Waspada dan jangan langsung terprovokasi dengan aliran pesan di dalamnya karena bisa saja apa yang sedang Anda simak adalah hoaks yang menyesatkan.

**Kedua, tidak sedikit hoaks politik yang dikemas dengan menghadirkan kutipan**

argumen dari tokoh dan/atau hasil riset dari lembaga atau institusi tertentu yang bisa saja tidak pernah dikeluarkan atau memang dikeluarkan namun sudah direkayasa satu atau beberapa bagiannya untuk mendukung maksud dan tujuan dari pembuat hoaks. *Cross check* kutipan tokoh dan/atau lembaga tertentu yang dinyatakan dalam pesan yang Anda terima dengan menelusuri akun/situs resmi dari tokoh/lembaga tersebut, pemberitaan terkait dari media resmi dan terpercaya, atau menanyakannya pada pakar yang memang kompeten.

**Ketiga, hoaks politik biasanya akan menyerang kehidupan personal dari tokoh yang ditarget.** Masa lalu tokoh, latar belakang keluarga, hingga konteks pribadi yang dikaitkan dengan SARA kerap menjadi senjata ampuh yang dikeluarkan. Anda sebaiknya tidak terlarut dalam rekayasa cerita yang terkesan menuding atau menyudutkan, melainkan fokus pada kisah positif dan inspiratif yang meliputi tokoh tersebut. Kisah inspiratif ini pun masih perlu dicermati ulang karena bisa saja sudah melalui rekayasa yang sesungguhnya tidak nyata atau benar terjadi. Jika tidak dapat memvalidasi kebenarannya maka sebaiknya tidak disebarluaskan kepada orang lain.

**Keempat, perhatikan pula alamat situs**

## **(pranala) apa saja khususnya situs berita yang disematkan pada pesan yang Anda terima.**

Jika berupa sumber yang kredibel, maka domain situs tidak berupa blog atau semacamnya. Selain itu, jika ia tergolong dalam portal berita daring, maka situs tersebut sudah pasti mengantongi izin resmi dari Dewan Pers dan memiliki susunan keredaksian yang terorganisasi serta memuat pedoman pemberitaan media siber di situsnya. Menurut data Kemenkominfo, hingga 2018 terdapat 43.000 portal berita daring namun yang sudah terverifikasi tidak lebih dari 100 portal.

KOMPETENSI  
KELIMA  
**VERIFIKASI**



# VERIFIKASI

Dalam lonjakan informasi menjelang pemilu 2019, pasti tidak mudah membedakan mana informasi yang akurat, mana yang tidak. Sebab, meskipun kerap kali kita menerima informasi politik yang sama secara viral di berbagai media sosial dan aplikasi *chat*, belum tentu informasi itu benar, bisa jadi hoaks politik. Oleh karena itu, setelah menganalisis informasi politik, tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi agar tidak terjebak dalam posisi sebagai konsumen atau bahkan penyebar hoaks politik.

**Verifikasi idealnya merupakan proses yang melembaga (internalisasi) dalam diri kita masing-masing sebelum pesan tersebut diproses dan diteruskan ke orang lain agar bisa menghindari berbagai dampak hoaks politik yang berupa: rasa tidak aman, prasangka dan kebencian, retaknya persatuan dan kesatuan masyarakat, kekacauan dan kekerasan, dan hilangnya nalar atau logika.**

Proses verifikasi informasi politik terutama jelang pemilu 2019 berfokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.

**Lepas dari Anda suka atau tidak suka terhadap calon pemimpin yang dijadikan objek informasi, Anda sebaiknya menahan diri untuk tidak mudah terpancing atas informasi yang beredar mengenai keburukan capres atau cawapres atau caleg mana pun. Anda harus melakukan verifikasi informasi politik dengan melakukan *cross check* dari sumber lain yang bisa dipercaya.**

Tujuan untuk melakukan pengecekan kembali ini adalah untuk memastikan informasi yang diperoleh benar-benar akurat sehingga Anda bisa terhindar dari hoaks politik baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dibagikan kepada pengguna media sosial lainnya atau anggota kelompok aplikasi *chat*.

Ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan dalam melakukan verifikasi terkait informasi politik jelang pemilu 2019.

**Pertama, carilah informasi sejenis dari sumber informasi yang berbeda, kemudian bandingkan dengan informasi politik yang Anda dapatkan.** Jika Anda menerima informasi politik mengenai capres atau cawapres atau caleg tertentu, sebaiknya Anda tidak langsung mempercayainya begitu saja. Hindari prasangka terhadap calon pemimpin atau calon legislatif tersebut meskipun secara pribadi Anda mungkin tidak menyukainya. Tahan diri, tahan jari Anda, jangan langsung membagikan informasi politik ke pengguna

media sosial atau aplikasi *chat* lainnya. Carilah informasi sejenis dari sumber yang berbeda. Pilihlah sumber yang bisa dipercaya. Dengan begitu, Anda bisa memastikan apakah informasi yang Anda terima benar atau bohong (hoaks).

Sebagai contoh, jika Anda mendapatkan informasi mengenai keburukan salah satu capres yang dibagikan melalui media sosial maupun aplikasi *chat*, pastikan Anda melakukan verifikasi menggunakan informasi sejenis dari berbagai sumber informasi yang ada untuk kemudian dicek melalui berbagai sumber informasi. Beragam sumber informasi yang bisa digunakan adalah media massa yang mempunyai reputasi bagus maupun mesin pencari yang terpercaya. Anda juga bisa bertanya pada teman atau saudara yang Anda anggap memahami persoalan politik Indonesia.

Namun demikian, perlu diingat, bahwa dalam melakukan komparasi informasi politik dari berbagai sumber informasi, Anda harus hati-hati untuk melihat kepentingan politis dari produsen informasi masing-masing. Sebagai contoh, jika Anda membandingkan informasi politik yang sama dari dua media massa yang berbeda maka sebaiknya Anda cari informasi tambahan tentang reputasi media tersebut juga kepemilikan media tersebut apakah terkait dengan kelompok politik tertentu atau tidak. Sebaiknya, Anda mencari setidaknya dua atau tiga media dengan kepemilikan yang berbeda. Bersikaplah kritis dengan menghubungkan konten informasi di media tersebut dengan latar belakang media untuk menentukan keakuratan informasi politik yang Anda terima.

**Kedua, manfaatkan berbagai fasilitas cek fakta (*fact checking*) atau yang bisa didapatkan secara mudah.** Fasilitas ini bisa digunakan untuk membedakan mana informasi yang berdasarkan fakta mana yang merupakan hoaks.

Beberapa contoh fasilitas cek fakta yang bisa diakses secara terbuka di Indonesia adalah:

- a. Website Cekfakta (<https://cekfakta.com/>)
- b. Website Stophoax (<https://stophoax.id/>)
- c. Website Turnbackhoax (<https://turnbackhoax.id/>)
- d. Google Chrome Extension WhatsApp Hoax Buster (<https://mafindo.gitbook.io/whatsapp-hoax-buster/>)
- e. Aplikasi Android Hoax Buster Tools (HBT) buatan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang bisa diunduh di Google Play.<sup>xxx</sup>

Selain beberapa contoh fasilitas di atas, Anda juga bisa menggunakan berbagai fasilitas umum yang tersedia di internet seperti Google Search (untuk informasi umum), Google Image (untuk gambar), dan *Google Maps/Earth* (untuk lokasi).

Dengan memanfaatkan beragam fasilitas tersebut, Anda bisa memastikan informasi yang Anda terima benar-benar akurat atau hoaks. Dengan begitu, Anda bisa menghindari risiko baik sebagai pengguna maupun penyebar hoaks politik terutama saat pemilu.

# KOMPETENSI KEENAM EVALUASI



# EVALUASI

Setelah melakukan verifikasi dan mendapatkan informasi politik yang Anda anggap sudah akurat dan bukan berupa hoaks politik, Anda sebaiknya masih mampu menahan keinginan untuk berbagi informasi kepada pengguna media sosial lainnya maupun anggota grup aplikasi *chat* yang diikuti.

Mengapa? Karena tidak semua informasi yang akurat akan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan satu tahapan lagi sebelum mendistribusikan informasi politik untuk orang lain yakni tahapan evaluasi.

Tahapan evaluasi merupakan kecakapan pengguna internet untuk melakukan mitigasi risiko informasi politik dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul.

**Pertama, pertimbangkan dampak informasi dengan membayangkan apakah informasi politik yang akan disebarkan bisa mengundang kepanikan atau kekhawatiran bagi penerima informasi atau tidak?** Pastikan informasi baik yang berupa tulisan, gambar atau foto, maupun video tidak akan meresahkan orang yang membacanya. Cara yang paling mudah adalah mencoba membayangkan jika Anda menerima informasi seperti yang akan Anda bagikan, apakah Anda merasa terganggu? Dampak lain yang bisa dipertimbangkan adalah ada tidaknya potensi informasi tersebut untuk memantik kekerasan, memicu perasaan terhina atau stres, atau menimbulkan kebencian? Jika iya, maka urungkan niat Anda untuk mendistribusikan pesan tersebut.<sup>xxxii</sup>

**Kedua, pertimbangkan siapa yang akan menjadi target khalayak informasi?** Jika penerima informasi adalah perseorangan, misalnya kolega, teman kerja, keluarga, atau sahabat, pertimbangkan lagi apakah informasi politik tersebut bermanfaat bagi mereka. Jika penerima informasi adalah *chat* grup, pertimbangkan apakah semua anggota grup bisa memanfaatkan informasi yang akan Anda bagikan.

**Ketiga, pertimbangkan penyajian informasi dengan melihat apakah bahasa yang digunakan sopan dan tidak menyinggung orang lain atau institusi tertentu.** Jika dalam informasi tersebut kata-kata yang kasar dan melecehkan orang, sebaiknya Anda pertimbangkan kembali apakah ada manfaatnya dibagikan ke orang lain.

**Keempat,** jika ada foto atau video dalam informasi politik yang akan Anda bagikan, **pertimbangkan terlebih dahulu apakah foto atau video itu tidak melanggar privasi orang lain maupun prinsip kemanusiaan.**

**Kelima, pertimbangan terakhir sebelum mendistribusikan adalah memahami konteks hukum penyebaran informasi di Indonesia.** Di negara kita, menyebarkan hoaks yang merugikan orang lain atau institusi tertentu bisa dikenakan hukuman positif. Yang disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yang telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Dengan memahami risiko hukum seperti ini maka Anda akan berpikir sebelum jari bertindak.

# KOMPETENSI KETUJUH DISTRIBUSI



# DISTRIBUSI

Ada pepatah lucu yang cukup populer yaitu hoaks menyebar melebihi kecepatan cahaya. Pepatah ini sebenarnya tidak hadir begitu saja tanpa sebab yang jelas. Penyebaran hoaks politik di Indonesia cukup mengkhawatirkan karena banyak bersinggungan dengan isu-isu yang sensitif, khususnya isu politik identitas seperti perbedaan agama dan ras. Informasi hoaks yang mengkaitkan politik dengan beragam perbedaan agama dan ras di Indonesia biasanya cepat diviralkan ulang oleh para pendukung fanatik kubu-kubu politik yang sedang bertarung berebut posisi. Proses viralnya hoaks inilah yang hampir tidak mungkin dapat diantisipasi secara maksimal, kecuali para penerimanya/pengguna internet memiliki kecakapan dalam memilah informasi.

Ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai dalam menerima banyaknya informasi yang bertebaran dalam media sosial, aplikasi *chat*, dan beragam laman digital. Banyak informasi hoaks yang sengaja disebar untuk membuat masyarakat bingung dalam mempercayai informasi.

Untuk mengembangkan kompetensi ini Anda dapat menerapkan beberapa cara. **Pertama, menggunakan nalar dan intuisi untuk mendistribusikan atau mendistribusikan ulang konten yang Anda terima.** Mempertanyakan dalam diri apakah informasi yang terkandung di dalam konten adalah benar dan sesuai dengan kenyataan, apakah informasi tersebut berpotensi menyinggung pihak lain, dan apakah informasi tersebut berguna, adalah tiga pertanyaan yang diajukan oleh diri sendiri sebelum menyebarkan suatu konten.

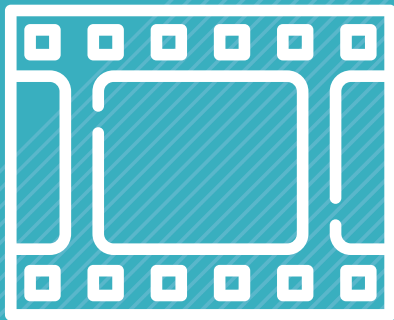
**Kedua, bila ingin menyebarkan informasi, Anda harus meyakini bahwa informasi tersebut juga bersumber dari pihak yang kredibel.** Informasi mengenai sumber informasi biasanya dapat dicari melalui mesin pencari di internet atau melalui penelusuran sederhana, terutama informasi yang berasal dari sumber resmi seperti pihak pemerintah dan organisasi yang dikenal oleh masyarakat. Bila Anda tidak yakin terhadap sumber informasi sebaiknya tidak menyebarkan informasi tersebut. Secara teknis, hindari situs yang berbentuk *blog* gratis atau dengan kemiripan nama dengan situs yang sebenarnya. Untuk mengecek sumber diperlukan kecermatan dan kehati-hatian.

**Secara spesifik, Anda juga mesti melakukan cross check untuk semua jenis informasi politik, terutama menjelang pemilu, karena semua kubu yang berkompetisi ingin memperoleh suara dengan atau tanpa menggunakan hoaks.** Dengan demikian, Anda tidak turut menyebarkan hoaks politik yang justru merugikan pemilu sebagai pesta demokrasi.

Terakhir, **Anda mesti membayangkan bahwa media sosial adalah arena yang terbuka, siapa pun berpotensi melihat, membaca, dan mencatat informasi yang dibagikan, sekalipun Anda membatasi pertemanan dengan sedikit teman, namun kemampuan gawai untuk merekam gambar dan video memungkinkan apa pun tercatat dan disebarkan kembali.**

Bertindak cerdas dalam bermedia sosial ditunjukkan melalui kemampuan mendistribusikan informasi. Anda boleh menjadi fanatik kepada calon yang didukung, namun kecerdasan, kehati-hatian, dan memberikan kepada pihak lain harus ditunjukkan melalui informasi yang Anda distribusikan sebab apa pun yang sudah disebar dan terpublikasi melalui akun media sosial akan terdokumentasi dan berdampak di masa depan.

# KOMPETENSI KEDELAPAN PRODUKSI



# PRODUKSI

Selain menjadi pembaca cerdas, Anda juga dituntut menjadi pembuat konten yang cerdas. Dalam pertarungan informasi politik yang ada saat ini, kadang Anda dituntut tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas, namun tidak jarang dipaksa untuk menjadi pembuat konten informasi guna melawan dan mengatasi informasi hoaks politik yang beredar dalam dunia digital.

**Banyaknya hoaks politik yang beredar dalam dunia maya, menuntut Anda untuk dapat mengedukasi masyarakat yang berada di lingkungan kita, khususnya lingkungan digital seperti grup WhatsApp, dan pertemanan di Facebook.** Dengan membagikan konten positif yang Anda ciptakan sendiri diharapkan sedikit banyak dapat memberikan pencerahan, pendidikan dan pemaknaan mereka terhadap banyaknya informasi hoaks politik.

**Bagaimana cara menciptakan konten politik yang bebas hoaks? Pastikan Anda mencari kebenaran dari sumber yang kredibel sebagai perlawanan terhadap informasi hoaks. Mencari bukti yang akurat guna menggugurkan hoaks dan memberikan pemahaman baru yang benar. Penciptaan konten yang kita lakukan ini merupakan perlawanan atau *counter* terhadap hoaks yang beredar di lingkungan sekitar kita.**

Walaupun begitu, sering sekali kendala yang dihadapi adalah tertutupnya pikiran orang yang mempercayai hoaks dengan tendensi mencari pembenaran dan tidak ingin mencari kebenaran. Sehingga terkadang proses penciptaan dan penyebarluasan konten *counterhoax* ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.

Beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi ini adalah: pertama, memastikan bahwa informasi yang Anda produksi akurat dan tidak menyesatkan, bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kedua, memberikan bukti-bukti yang akurat dalam konten yang Anda ciptakan. Ketiga, dalam menyusun konten atau informasi Anda harus menghindari penggunaan kata, kalimat dan audio visual yang dapat menyinggung privasi orang lain. Keempat, menyebarkan informasi kepada khalayak yang dituju melalui platform yang sesuai.

# KOMPETENSI KESEMBILAN PARTISIPASI



# PARTISIPASI

Sebagai warganet yang cerdas, Anda harus mampu menjadi bagian dari pemberantasan hoaks. **Berpartisipasi dalam literasi digital hoaks politik berarti menyampaikan pengetahuan kritis tentang bahaya hoaks politik kepada orang lain.** Anda dapat menyampaikan pengetahuan berdasarkan menyebarkan fakta riil tentang kondisi riil untuk melawan hoaks politik.

Bukan itu saja, berpartisipasi juga berarti secara aktif terlibat dalam interaksi dengan orang lain yang juga memiliki perhatian pada literasi digital melawan hoaks politik. Dalam interaksi ini, Anda dapat bertukar informasi terutama menyangkut kasus-kasus terbaru dari hoaks politik.

Penyebaran hoaks politik lumrah ditemukan dalam beberapa media sosial dan grup berbagi pesan yang secara cepat diviralkan. Hal ini menjadikan penyebaran informasi hoaks politik semakin susah untuk dibendung. Tugas Anda sebagai warganet yang cerdas untuk ambil bagian dan berpartisipasi dalam menahan dan menghilangkan laju informasi hoaks politik di media digital.

Anda perlu tahu bahwa berpartisipasi dalam literasi digital melawan hoaks politik bisa dilakukan melalui beberapa langkah. **Pertama, selalu proaktif dalam memberikan fakta untuk melawan hoaks pemberitaan politik.** Hal ini bisa dimulai dari lingkaran internal teman dan keluarga dekat. Dimulai dengan mengoreksi informasi yang salah atau penggunaan data yang keliru oleh orang-orang terdekat.

**Langkah kedua, setelah memberikan penjelasan pada lingkaran internal orang-orang dekat, terutama bila Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu bidang, Anda dapat mulai mengikuti forum-forum antisipasi dan pemberantasan hoaks yang sekarang banyak berkembang di masyarakat.**

Banyak warganet yang berkecimpung mengurus pemberantasan hoaks karena potensinya yang sangat merusak.

**Langkah terakhir adalah Anda dapat mengikuti beragam aktivitas di dunia maya dengan menyebarkan fakta agar hoaks politik dengan sendirinya terbantahkan.**

Sudah cukup banyak elemen masyarakat sipil yang bergerak mencegah hoaks, antara lain cekfakta, stophoax, turnbackhoax. Selain berpartisipasi secara sosial dengan turut mengedukasi masyarakat tentang antisipasi dan pemberantasan hoaks, Anda juga dapat berpartisipasi secara hukum dengan melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan hoaks, terutama bila dilakukan berulang kali dan menyinggung harmoni masyarakat.

# KOMPETENSI KESEPULUH KOLABORASI

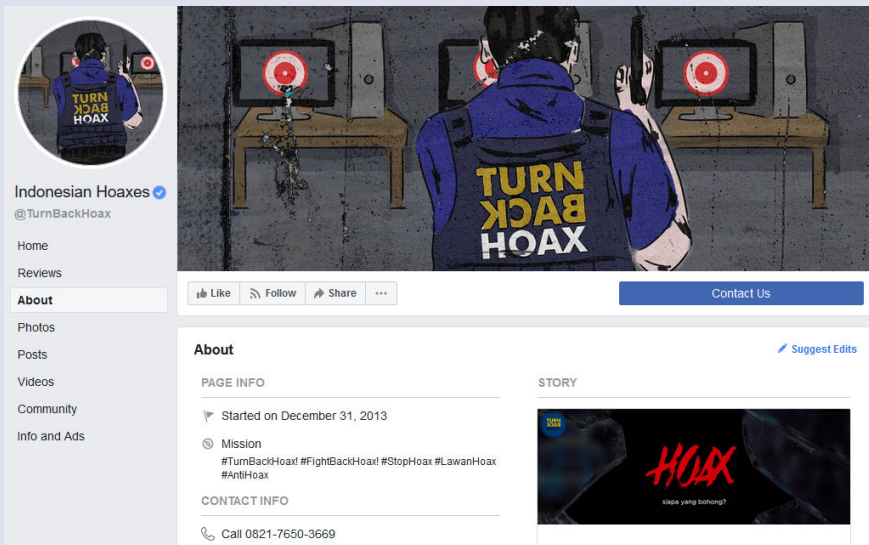


# KOLABORASI

Hoaks politik akan semakin sulit dilawan jika tidak ada tindakan kolektif untuk bersama-sama bergerak menghentikan penyebarannya. Tindakan kolektif ini tentu saja bermula dari partisipasi aktif setiap individu dalam upayanya untuk tidak meneruskan pesan hoaks politik dan ikut melaporkannya. Gerakan kecil individu tersebut jika dipadukan dengan gerakan bersama maka akan berpengaruh secara masif. Oleh karena itu, kolaborasi adalah kompetensi individu sekaligus tindakan bersama yang diperlukan untuk melawan hoaks politik dan menciptakan pemilu damai di Indonesia.

Berkolaborasi dalam melawan hoaks politik dapat dilakukan dengan bergabung dalam komunitas dan gerakan yang lebih sistemis dalam melawan hoaks politik. Berikut adalah beberapa komunitas yang bisa Anda ikuti.

## Indonesian Hoaxes



Indonesian Hoaxes ✓  
@TurnBackHoax

Home  
Reviews  
**About**  
Photos  
Posts  
Videos  
Community  
Info and Ads

Like Follow Share ... Contact Us

**About** [Suggest Edits](#)

**PAGE INFO**

Started on December 31, 2013

Mission  
#TurnBackHoax #FightBackHoax #StopHoax #LawanHoax #AntiHoax

**CONTACT INFO**

Call 0821-7650-3669

**STORY**

HOAX  
sapa yang bohong?

Indonesian Hoaxes atau TurnBackHoax dibentuk 31 Desember 2013 dengan anggota yang mencapai 240.700 orang. Bergabung melalui komunitas ini dengan mengunjungi pranala <https://www.facebook.com/TurnBackHoax/>

## Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoaks (FAFHH)



Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks  
Public group

**About**  
Discussion  
Members  
Events  
Videos  
Photos  
Files

Search this group

[+ Join Group](#) [... More](#) Join this group to post and comment.

**About This Group**

Description

Bagi yang sudah bosan banjir berita hoax, fitnah, dan provokasi (hasutan), silakan bergabung. Mari bersama kita berbagi berita yang benar di FAFHH.

Grup: [facebook.com/groups/fafhh](https://www.facebook.com/groups/fafhh)  
Page: [facebook.com/mafindoid](https://www.facebook.com/mafindoid)  
Twitter: ... See More

**HISTORY**

Group created on September 8, 2015  
[See More](#)

**GROUP BY**

 **Masyarakat Anti Fitnah Indo...**  
16,589 like this

FAFHH adalah grup Facebook yang kegiatan utamanya melawan fitnah, hasut dan hoaks sejak September 2015. Anggotanya berjumlah sekitar 60.000 orang per Januari 2019. Melalui grup ini, Anda dan anggota lainnya bisa turut berkolaborasi untuk memeriksa atau mengklarifikasi informasi yang diragukan atau berpotensi hoaks. FAFHH bisa dikunjungi melalui <https://www.facebook.com/groups/fafhh/>

## Indonesian Hoax Buster

Indonesian Hoax Busters  
Public group

**About**

- Discussion
- Members
- Events
- Videos
- Photos
- Files

Search this group

[+ Join Group](#) [... More](#) Join this group to post and comment.

**About This Group**

**Description**

INDONESIAN HOAX BUSTERS adalah Grup Netizen Indonesia untuk mengetahui kebenaran dari sebuah informasi, serta Ruang Diskusi bagi Netizen Indonesia dalam berbagi info dan pengetahuan dengan

Visi.Menciptakan Ruang Diskusi Yang... [See More](#)

**Group Type**

Study Group

**HISTORY**

Group created on May 14, 2016

[See More](#)

**CREATE NEW GROUPS**

Groups make it easier than ever to share with friends, family and teammates.

[Create Group](#)

Grup Facebook Indonesian Hoax Buster dibentuk November 2016. Hingga Januari 2019, grup ini sudah beranggotakan 5.236 orang. Melalui grup ini, Anda bisa ikut berdiskusi dengan anggota lainnya dalam melawan hoaks (tidak hanya hoaks politik). Anda bisa bergabung melalui <https://www.facebook.com/groups/IndoHoaxBuster/>

## Sekoci

**Sekoci**  
Public group

**About**

- Discussion
- Members
- Events
- Videos
- Photos

Search this group

**+ Join Group** **... More** Join this group to post and comment.

**About This Group**

**Description**

Sekoci adalah sebuah grup diskusi dengan fokus bahasan hoax atau pemberitaan palsu. Mengedepankan iklim diskusi yang nyaman, santai, dan edukatif, kami berharap para partisipan dalam grup ini dapat menambah pengetahuan dan me... [See More](#)

**Group Type**

Study Group

**HISTORY**

Group created on March 26, 2016  
[See More](#)

**GROUP BY**

**Sekoci Hoaxes**  
13,166 like this  
[Send Message](#)

Kolaborasi dengan grup Sekoci melalui <https://www.facebook.com/groups/icokes/>. Anggota komunitas daring ini berjumlah 13.154 anggota per Januari 2019.

Selain melalui komunitas daring tersebut, Anda juga dapat turut serta dalam gerakan relawan melawan hoaks seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang hingga kini sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mafindo sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015 yang bermula dari komunitas daring FAFHH. Kunjungi situs web Mafindo di <https://www.mafindo.or.id/>

## MAFINDO – MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA

### About

MAFINDO is an anti hoax CSO (civil society organization). We began as online grassroots movement since 2015. Founded as organization on 19th November 2016, we have spearheaded many anti hoax initiatives, such as crowdsourced hoax busting, digital literacy education for the public, CekFakta.com, and public campaigns to raise awareness about hoax and its dangers.

#### VISION

1. An independent and dynamic civil society organization which actively participates to enlighten & develop public's capability for critical thinking.
2. Immunize the public against the hoax plague, also against hate speech and provocations.
3. Participates to help realize a civil society that's active, peaceful, and prosperous.

Beberapa komunitas daring maupun luring tersebut hanyalah beberapa saja yang aktif melakukan atas bukanlah batasan bagi Anda untuk membuat gerakan. Anda dan komunitas di sekitar Anda juga bisa merintis tindakan kolaboratif lainnya yang disesuaikan dengan kondisi politik masyarakat. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan pemilu Indonesia yang damai dan bebas dari hoaks. Bahkan lebih luas lagi, gerakan yang Anda rintis/ikuti dapat turut meningkatkan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia ke tingkatan yang lebih baik. **Semangat berkolaborasi!**

**BERSIKAPLAH  
KRITIS, LAWAN  
HOAKS POLITIK,  
CIPTAKAN  
PEMILU DAMAI**

Pemilu yang dianggap sebagai pesta demokrasi acap kali dijadikan salah satu indikator penting untuk mengukur keamanan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Keamanan yang di dalam era digital ini bukan hanya keamanan di dunia nyata tapi juga di dunia maya.

Suasana yang tegang dan tidak nyaman jelang pemilu sangat terasa di dunia maya terutama di beragam media sosial dan aplikasi *chat*. Informasi mengenai capres, cawapres, dan caleg kerap diolah menjadi hoaks demi kepentingan sekelompok orang tertentu.

Berbagai macam isu terkait kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu seperti suku, agama, etnis, gender, difabel dan orientasi seksual juga turut dijadikan bahan untuk menghasut serta menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu.

Dalam kondisi yang seperti ini, sebagai warganet Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita turut ambil bagian untuk menciptakan suasana damai jelang, saat dan pascapemilu. Salah satu caranya adalah bertindak bijak dalam mengelola informasi politik terkait pemilu.

Bersikap bijak dan menahan diri untuk tidak terseret menyebarkan informasi penuh kebohongan dan kebencian terhadap capres, cawapres atau caleg--terlepas dari suka atau tidak suka terhadap calon pemimpin yang akan kita pilih tersebut-- adalah kewajiban kita sebagai warga negara.

Sekali lagi, jika Anda ingin menjadi warga negara yang baik, maka bersikaplah tenang dan selalu gunakan nalar Anda ketika menerima informasi politik apa pun. Pastikan Anda tak hanya menguasai teknologi tapi juga mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan memahami informasi yang Anda terima. Kemudian, lakukan analisis terhadap informasi tersebut apakah masuk akal atau tidak sekaligus cek dengan informasi lain serta lakukan mitigasi risiko sebelum informasi politik didistribusikan.

Bahkan, jika Anda ingin jadi warga negara yang aktif dalam turut berkontribusi menciptakan pemilu damai, buatlah informasi pemilu yang akurat sekaligus menenangkan. Kalau perlu berpartisipasi untuk mengajak

orang-orang yang terdekat baik keluarga, teman kerja dan kolega yang sering kali tergabung di berbagai grup aplikasi *chat* untuk turut bijak mengelola informasi agar tidak terjebak sebagai penyebar hoaks. Berkolaborasi dengan komunitas lain agar bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam menyambut pesta demokrasi.

Dengan mempraktikkan sepuluh kompetensi literasi digital dalam mengelola informasi politik jelang pemilu 2019, Anda tak hanya melatih diri untuk bersikap bijak, tenang dan selalu berpikir kritis. Namun, Anda juga akan menjadi salah satu warga negara yang baik dan berkontribusi dalam menciptakan pemilu Indonesia yang damai.

## ***Endnotes***

<sup>i</sup>Lihat Heywood, 2007.

<sup>ii</sup>Lihat Tansey & Jackson, 2008.

<sup>iii</sup>Lihat Aspinall & Mietzner (Eds.), 2010:13.

<sup>iv</sup>Lihat McNair, 2011.

<sup>v</sup>Lihat Perloff, 2014.

<sup>vi</sup>Lihat Athique, 2013.

<sup>vii</sup>Lihat Flew, 2014.

<sup>viii</sup>Lihat Fuchs, 2014.

<sup>ix</sup>Lihat Patrut & Patrut (Eds.), 2014.

<sup>x</sup>Lihat Ball, 2017.

<sup>xi</sup>Lihat Davis, 2017.

<sup>xii</sup>Rohmatin Bonasir, "Pembunuhan Terkait Capres di Sampang: "Beda Pilihan Presiden, Asal Tidak Saling Menghina", *bbc.com* tanggal 26 November 2018.

<sup>xiii</sup>Dias Prasongko, "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", *Tempo.co* tanggal 5 Oktober 2018.

<sup>xiv</sup>Lihat "Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Ini Peran 5 Tersangka yang Ditangkap", *Kompas.com* tanggal 12 Januari 2019.

<sup>xv</sup>Lihat <https://www.brookings.edu/research/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/>

<sup>xvi</sup>Aturan tersebut terdapat dalam <https://www.fcc.gov/reportsresearch/guides/hoaxes>

<sup>xvii</sup>Rahayu, et al, 2016.

<sup>xviii</sup>Tapsell, 2018.

<sup>xix</sup>Hasil riset Asosiasi Jasa Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017.

<sup>xx</sup>Lihat Kurnia & Astuti, 2017.

<sup>xxi</sup>Lihat Fuchs, 2014: 44.

<sup>xxii</sup> Lihat Flew, 2014.

<sup>xxiii</sup> Lihat Potter, 2004 dan 2014.

<sup>xxiv</sup> Lihat Bolter & Grusin, 1999.

<sup>xxv</sup> Lihat Chen, *et.al*, 2011 dan Lin, *et.al.*, 2013.

<sup>xxvi</sup> Kesepuluh tahapan kompetensi literasi digital dalam versi yang sedikit berbeda telah dijelaskan dalam dua buku panduan yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu: *Yuk, Tanggap dan Bijak Berbagi Informasi Bencana Alam melalui Aplikasi Chat* dan *Yuk, Jadi Gamer Cerdas: Berbagi Informasi melalui Literasi*.

<sup>xxvii</sup> Inti sari survei ini dapat diakses pada <https://tirto.id/hoaks-tidak-efektif-pengaruhi-pemilih-sampai-januari-2019-ddLw>

<sup>xxviii</sup> Penjelasan sanksi pidana untuk masyarakat yang menyebarkan hoaks dapat diakses pada

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/>

<sup>xxix</sup> Penjelasan sanksi pidana bagi ASN yang melakukan penyebaran hoaks dapat diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/>

<sup>xxx</sup> Lihat Ali-Fauzi (ed.), 2019:30

<sup>xxxi</sup> Lihat Ali-Fauzi (ed.), 2019:15

# DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, I (Ed.). (2019). *Buku panduan melawan hasutan kebencian*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
- APJII. (2017). *Infografis penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia (survei 2017)*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Aspinall, E. & Mietzner, M. (Eds.) (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections Institutions and society*. Singapore: ISEAS.
- Athique, A. (2013). *Digital media and society: An introduction*. Cambridge: Polity.
- Ball, J. (2017). *Post-truth: How bullshit conquered the world*. London: Biteback Publishing.
- Bolter, J. D. & Grusin, R. (1999). *Remediation: Understanding new media*. London: MIT Press.
- Bonasir, R. (2018, November 26). Pembunuhan terkait capres di Sampang: Beda pilihan presiden, asal tidak saling menghina. *BBC*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46345977>
- Chen, D., Wu, J. & Wang, Y. (2011). Unpacking new media literacy. *SYSTEMICS, Cybernetics and Informatics*, 9(2), 85–88.
- Davis, E. (2017). *Post-truth: Why we have reached peak bullshit and what we can do about it*. London: Little Brown.
- Flew, T. (2014). *New media* (4<sup>th</sup> ed). Oxford: Oxford University Press.
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. London: Sage Publications.
- Heywood, A. (2007). *Politics* (3<sup>rd</sup> ed). New York: Palgrave.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018, January 8). Menkominfo: Baru 100 portal berita online terverifikasi. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru->

- 100-portal-berita-online-terverifikasi/0/berita\_satker  
Kompas. (2019, February 12). Disinformasi: temuan hoaks terkait politik mendominasi. *Kompas*. Retrieved from: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190212/281599536756507>
- Kurnia, N. & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, 47(2), 149-166.
- Kurnia, N., Monggilo, Z.M.Z. & Adiputra, W. M. (2018). *Yuk, tanggap dan bijak berbagi informasi bencana alam melalui aplikasi chat*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.
- Lin, T.-B., Li, J.-Y., Deng, F., & Lee, L. (2013). Understanding new media literacy: An explorative theoretical framework. *Educational Technology & Society*, 16(4), 160-170.
- McNair, B. (2011). *An introduction to political communication* (5<sup>th</sup> ed). London: Routledge.
- Nathaniel, F. (2019, January 8). Hoaks tidak efektif pengaruhi pemilih sampai januari 2019. *Tirto*. Retrieved from <https://tirto.id/hoaks-tidak-efektif-pengaruhi-pemilih-sampai-januari-2019-ddLw>
- Patrut, B. & Patrut, M. (Eds.) (2014). *Social media in politics: Case studies on the political power of social media*. New York: Springer.
- Perloff, R. M. (2014). *The dynamics of political communication: Media and politics in a digital age*. New York: Routledge.
- Potter, W.J. (2004). *Theory of media literacy: A cognitive approach*. London: Sage Publications.
- Potter, W.J. (2014). *Media literacy* (7<sup>th</sup> ed.). London: Sage Publications.
- Qur'ani, H. (2018, May 23). Pasal berlapis bagi penyebar berita hoax. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/>
- Rahayu, Wahyono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., ..., Siregar, A. E. (2016). *Membangun sistem komunikasi Indonesia:*

*Terintegrasi, adaptif, dan demokratis*. Yogyakarta: PR2Media dan Tifa Foundation.

- Rahma, A. (2019, January 8). Polisi tangkap pembuat konten hoaks surat suara tercoblos. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1162835/polisi-tangkap-pembuat-konten-hoaks-surat-suara-tercoblos>
- Rahma, A. (2019, January 9). Modus-modus tersangka hoax 7 kontainer surat suara agar viral. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1163054/modus-modus-tersangka-hoax-7-kontainer-surat-suara-agar-viral/full&view=ok>
- Tansey, S.D., & Jackson, N. (2008). *Politics: The basics* (4<sup>th</sup> ed.). New York: Routledge.
- Tapsell, R. (2018). *Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Viva. (2016, November 21). Deretan pasal dan ancaman pidana bagi penyebar h o a x . *V i v a* . Retrieved from <https://www.viva.co.id/digital/digilife/850193-deretan-pasal-dan-ancaman-pidana-bagi-penyebar-hoax>
- Yuwono, A. I., Anshari, I. N., Rahayu, Syafrizal, & Adiputra, W. M. (2018). *Yuk, jadi gamer cerdas: Berbagi informasi melalui literasi*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.

# TENTANG PENULIS

## **Wisnu Martha Adiputra, S.I.P., M.Si.**

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Master Sains (M.Si.) dari Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Minat risetnya di antaranya adalah literasi digital, komunikasi digital, media dan budaya populer, dan kebijakan komunikasi. Penulis dapat dihubungi melalui [wisnumartha@ugm.ac.id](mailto:wisnumartha@ugm.ac.id).

## **Novi Kurnia, Ph.D.**

Penulis adalah staf pengajar dan ketua program studi magister ilmu komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) dari Flinders University tahun 2014. Saat ini, ia juga menjadi koordinator Japelidi. Minat risetnya di antaranya adalah literasi digital, *gender* dan komunikasi, dan kajian film. Penulis dapat dihubungi melalui [novikurnia@ugm.ac.id](mailto:novikurnia@ugm.ac.id).

## **Zainuddin Muda Z. Monggilo, S.I.Kom., M.A.**

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.) bidang ilmu komunikasi dan media dari Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Minat risetnya di antaranya adalah komunikasi digital, media baru, jurnalisme digital, dan literasi digital. Penulis dapat dihubungi melalui [zainuddinmuda19@ugm.ac.id](mailto:zainuddinmuda19@ugm.ac.id).

### **Ardian Indro Yuwono, S.I.P., M.A.**

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.) di bidang Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Minat risetnya di antaranya adalah kajian kritis video game, budaya populer dan hiburan, komunikasi digital dan *new media*. Penulis dapat dihubungi melalui [ardianindroyuwono@ugm.ac.id](mailto:ardianindroyuwono@ugm.ac.id).

### **Dr. Rahayu, M.Si., M.A.**

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Doktorat (Dr.) di bidang Manajemen Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Minat risetnya di antaranya adalah literasi media, komunikasi organisasi, manajemen media, dan kebijakan komunikasi. Penulis dapat dihubungi melalui [rahayu@ugm.ac.id](mailto:rahayu@ugm.ac.id).

**D**ua hal yang patut disyukuri oleh warganet Indonesia adalah sistem demokrasi yang dirasakan sampai saat ini, antara lain kebebasan beropini dan berekspresi, memilih calon pemimpin secara langsung, serta kemajuan dunia digital yang luar biasa. Sayangnya, kesempatan tersebut dapat ikut ternodai dengan merebaknya hoaks politik yang disebarkan melalui berbagai platform media digital menjelang pemilu tahun 2019. Hoaks ibarat racun bagi demokrasi dan berdampak destruktif sebab memicu konflik antarpemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Warganet yang tidak memahami literasi digital sangat rentan untuk turut memproduksi dan menyebarkan hoaks politik. Pada gilirannya hal ini akan menurunkan kualitas pemilu yang akan kita jalani. Oleh karena itu, memahami literasi digital dalam melawan hoaks politik adalah tanggung jawab warganet secara khusus dan kita semua tanpa terkecuali sebagai warga negara Indonesia.

Panduan literasi digital *Yuk, Lawan Hoaks Politik, Ciptakan Pemilu Damai!* ini memberikan penjelasan mengenai sepuluh tahapan kompetensi literasi digital ala Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) yang sedianya dapat diimplementasikan oleh warganet secara khusus untuk mencegah hoaks politik menjelang pemilu 2019. Harapannya, panduan ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan tahun politik yang kondusif dan memperbaiki kualitas demokrasi yang telah kita rasakan selama dua dekade ini. Mari bersama lawan hoaks politik karena pemilu damai ada di tangan kita semua!

ISBN 978-602-71877-7-1



PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Jaringan Pegiat  
Literasi Digital



SIBER  
KREASI  
SERIKAN NASIONAL  
LITERASI DIGITAL